

Kemampuan anggaran pendapatan desa: studi komparatif pada Desa Tanjung Mulia dan Desa Ujung Tanjung di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi

Andri Apriyanto; Parmadi; Erni Achmad

Prodi Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

E-mail korespondensi : apriyantoandri20@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze: 1) the level of dependency of income budget at Tanjung Mulia Village and Ujung Tanjung Village Muaro Jambi Regency to Budget of Revenue and Expenditure of Region; 2) the level of decentralization of income budget of Tanjung Mulia Village and Ujung Tanjung Village Muaro Jambi Regency. The data used are APBDes data and fund allocation of Desa Tanjung Mulia village and Ujung Tanjung village in South Bahar Subdistrict during 2010-2015 period. The results of the study found that the dependency ratio in Tanjung Mulia and Ujung Tanjung villages is still relatively high. Based on the degree of decentralization of the village income budget, Desa Tanjung Mulia is quite autonomous while Ujung Tanjung Village is less autonomous.

Keywords: *APBDes, ADD, Dependency Ratio, Decentralization*

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis: 1) tingkat ketergantungan anggaran pendapatan pada Desa Tanjung Mulia dan Desa Ujung Tanjung Kabupaten Muaro Jambi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2) besaran tingkat desentralisasi anggaran pendapatan Desa Tanjung Mulia dan Desa Ujung Tanjung Kabupaten Muaro Jambi. Data yang digunakan adalah data APBDes dan alokasi dana desa Desa Tanjung Mulia dan Desa Ujung Tanjung di Kecamatan Bahar Selatan selama periode tahun 2010-2015. Hasil penelitian menemukan bahwa rasio ketergantungan di Desa Tanjung Mulia dan Desa Ujung Tanjung masih tergolong tinggi. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi anggaran pendapatan desa, Desa Tanjung Mulia cukup otonom sedangkan Desa Ujung Tanjung kurang otonom.

Kata kunci: APBDes, ADD, Rasio Ketergantungan, Desentralisasi

PENDAHULUAN

Cita-cita dan tujuan nasional memberikan arah bagi pelaksana pembangunan agar dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan sarasanya adalah dengan melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis, maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu merealisasikan cita-cita dan tujuan tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi pada dasarnya terdiri dari

desentralisasi politik (*political desentrlication*), desentralisasi administrasi (*administrative desentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal desentralization*), dan desentralisasi ekonomi (*economic desentralization*) menurut Widjaja, H.A.W.

Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan melalui pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat, ditambah dengan argumen untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebabkan lebih menguatnya sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah pusat selama ini melahirkan krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda dan memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan memunculkan ketergantungan pemerintah daerah dalam hal penetapan kebijakan yang diambil di daerah dikarenakan selalu menanti kebijakan yang diatur dari pusat dan berlaku secara umum di daerah, termasuk di dalamnya adalah bantuan yang di berikan oleh pemerintah pusat berupa subsidi dan transfer untuk pendanaan pembangunan yang dilakukan di daerah. Untuk itu diperlukan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Pengambilan keputusan menunggu petunjuk dan pengarahan dari pusat dalam bentuk usulan-usulan strategis, sejalan dengan itu memunculkan undang-undang untuk mengelola administrasi pemerintah daerah serta pemberdayaan keuangan daerah untuk lebih berguna bagi pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian merupakan salah satu kebijakan, diperlukan adanya pemberian keleluasan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintah dan bertanggungjawab akan pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah melalui Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah.

Kecamatan Sungai Bahar Selatan di Kabupaten Muaro Jambi, terbentuk berdasarkan peraturan daerah Nomor 28 tahun 2009 tentang pemekaran kecamatan Sungai Bahar menjadi 3 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bahar Utara, Kecamatan Bahar Tengah, dan Kecamatan Bahar Selatan. Kecamatan Bahar Selatan terdiri dari 10 unit desa, salah satu bentuk hasil pemekaran Kecamatan Bahar Selatan adalah Desa Ujung Tanjung dengan Ibu kota Kecamatan Tanjung Mulia yang berjarak tempuh dari Desa Ujung Tanjung ke Ibu kota Kecamatan Bahar Selatan sejauh 5 KM. Pada tingkat desa ternyata permasalahan pokok pembangunan terletak pada kemampuan menghimpun penerimaan desa guna membiayai pengeluaran pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan pembangunan sarana prasarana desa, sebagai gambaran terjadi di Desa Tanjung Mulia dan Desa Ujung Tanjung yang masih bertumpu dan didominasi oleh bantuan dari pemerintah, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagian dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa masih rendahnya kemampuan desa dalam memobilisasi sumber pendapatan yang ada di desa.

Secara umum anggaran pendapatan desa, di Desa Tanjung Mulia dan Desa Ujung Tanjung mengalami fluktuasi. Anggaran pendapatan Desa Tanjung Mulia pada tahun 2010 terealisasi sebesar Rp 465.779.400 namun pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 18,5 persen, dengan nilai realisasi sebesar Rp 379.707.908. Di tahun 2012 anggaran Desa Tanjung Mulia menurun sebesar Rp 347.742.607 atau turun 8,4 Persen dari tahun 2011 sebesar 379.707.908. Pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali sebesar 13 persen dari tahun sebelumnya, dengan nilai realisasi sebesar Rp 302,625,497.

Namun pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 408.533.273 atau naik 35 persen dari tahun 2013. Pada tahun 2015 realisasi anggaran pendapatan yang diperoleh Desa Tanjung Mulia adalah sebesar Rp 338.002.889 lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 408.533.273 atau menurun sebesar 17,3 persen (Data APBDes Desa Tanjung Mulia tahun 2010-2015).

Pada tahun yang sama anggaran pendapatan di Desa Ujung Tanjung terealisasi dari Rp 202.243.000 pada tahun 2010 menjadi Rp 285.188.367 pada tahun 2011 meningkat sebesar 41 persen. Tahun 2012 realisasi anggaran di Desa Ujung Tanjung menurun sebesar 11,8 persen dari tahun 2011 menurun menjadi Rp 251.428.564 tahun 2012. Pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 253.288.564 sebesar 0,7 persen. Tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 32,5 persen dari tahun 2013 menjadi Rp 335.502.991 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 Desa Ujung Tanjung mengalami peningkatan sebesar Rp 612.428.864 lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 Rp 335.502.991 atau meningkat sebesar 82,5 persen (Data APBDes Desa Ujung Tanjung tahun 2010-2015).

Berdasarkan kenyataan diatas, dapat diketahui bahwa walaupun dari sisi anggaran pendapatan di kedua desa rata-rata mengalami peningkatan dan penurunan namun secara nominal besaran anggaran yang diperoleh menunjukkan perbedaan. Hal ini di sinyalir terjadi karena adanya perbedaan besaran nilai realisasi anggaran pemerintah yang disumbangkan oleh masing-masing komponen anggaran penerimaan, yaitu PADes, bantuan dari pemerintah, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagian dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah propinsi, kabupaten dan desa lainnya, penerimaan dari hibah dan swadaya pihak ketiga, serta pinjaman desa.

Dalam kaitan mengkaji lebih jauh tentang realisasi penerimaan anggaran pendapatan desa ini, yang di kaitkan dengan kemampuan keuangan desa, maka akan dibahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul : Analisis komparatif kemampuan anggaran pendapatan desa antara Desa Tanjung Mulia dan Desa Ujung Tanjung di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data APBDes dan alokasi dana desa Desa Tanjung Mulia dan Desa Ujung Tanjung di Kecamatan Bahar Selatan selama periode tahun 2010-2015. Alat analisis yang digunakan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis tujuan pertama yaitu besaran rasio ketergantungan anggaran pendapatan desa baik untuk Desa Tanjung Mulia dan Desa Ujung Tanjung di gunakan formulasi yang di kemukakan oleh Mahmudi, (2007) :

$$RKKDest = \frac{\text{Pendapatan Keuangan}}{\text{Total Pendaptan Daerah}} \times 100$$

Untuk kebutuhan penelitian, formulasi (3.1) disederhanakan menjadi :

$$RKKDest = \frac{ADDt+BKPt}{TPDest} \times 100$$

Di mana :

RKKDest = Rasio Ketergantungan Anggaran Pendapatan Desa

ADDest = Nilai Alokasi Dana Desa tahun t

BKPt = Nilai Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Desa

TPDest = Total Pendapatan Desa tahun t

- b. Untuk menganalisis tujuan kedua yaitu besaran rasio desentralisasi anggaran pendapatan desa baik untuk Dana Desa Tanjung Mulia dan Desa Ujung Tanjung di

Kecamatan Bahar Selatan di gunakan formulasi derajat desentralisasi, sebagaimana di kemukakan oleh Mahmudi, (2007) :

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Untuk penyesuaian, dalam penelitian ini formulasi (3.3), di sederhanakan menjadi:

$$R_{Dest} = \frac{PAD_{est}}{TPAD_{est}} \times 100$$

Di mana :

- R_{Des} = Rasio Desentralisasi Anggaran Pendapatan Desa
 PAD_{est} = Nilai penerimaan Pendapatan Asli Desa tahun t
 $TPDest$ = Nilai Total Pendapatan Desa tahun t

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio derajat desentralisasi pendapatan atau sering disebut rasio otonomi fiscal daerah adalah kemampuan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Rasio kemampuan daerah dihitung dengan cara membandingkan antara komponen pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. (Halim, 2001).

Rasio ketergantungan keuangan desa merupakan tingkat ketergantungan pemerintah desa dalam hal pemenuhan pembiayaan untuk pembangunan di desa. Semakin tinggi nilai rasio yang didapat dari perbandingan antara bantuan keuangan pemerintah pusat/provinsi dan pemerintah kabupaten terhadap total pendapatan desa, semakin tinggi pula ketergantungan keuangan desa terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat/provinsi dan pemerintah kabupaten dan sebaliknya.

Tingkat rasio ketergantungan anggaran pendapatan desa mengalami kenaikan selama periode 2010-2015 di Desa Tanjung Mulia, ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 77,16%. Walaupun demikian, nilai rata-rata rasio sebesar 53,12%, ketergantungan masih tergolong cukup tinggi karena berada dikisaran 41-60%, agar desa tidak mengalami ketergantungan maka seharusnya Desa Tanjung Mulia harus meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Apabila pendapatan asli desa tinggi maka ketergantungan Desa Tanjung Mulia terhadap bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pemerintah kabupaten tidak terlalu dominan untuk membiayai pembangunan Desa Tanjung Mulia. Dapat dikatakan rasio ketergantungan cukup tinggi, menggambarkan pemerintah pusat/provinsi dan pemerintah kabupaten cukup dominan daripada kemandirian pemerintah desa.

Tingkat rasio ketergantungan anggaran pendapatan desa mengalami kenaikan dan penurunan selama periode 2010-2016 di desa Ujung Tanjung, persentase ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 67,40% dan ketergantungan keuangan terkecil terjadi pada tahun 2015 sebesar 39,54%. Dapat dilihat nilai rasio ketergantungan di Desa Ujung Tanjung selama kurun waktu 6 tahun terus mengalami kenaikan dan penurunan yang variatif. Walaupun demikian, nilai rata-rata rasio sebesar 56,57%, ketergantungan tergolong masih cukup tinggi karena berada di kisaran 61-80%. Dapat dikatakan rasio ketergantungan cukup tinggi, menggambarkan peranan pemerintah pusat cukup dominan daripada kemandirian desa (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi desa). Hal ini mendasar dari kriteria desa ini mengacu pada belum mandirinya keuangan suatu desa dalam melaksanakan otonomi desa, karena masih cukup tingginya presentase nilai rasio ketergantungan keuangan desa terhadap bantuan keuangan pemerintah pusat/provinsi dan pemerintah kabupaten.

Secara terperinci rasio ketergantungan keuangan daerah (RKKD) dan derajat desentralisasi (DD) kedua desa tersebut diberikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbedaan kemampuan anggaran pendapatan Desa antara Desa Tanjung Mulia dan Desa Ujung Tanjung Kabupaten Muaro Jambi tahun 2010-2015

Tahun	RKKD (%)		DD (%)	
	Desa Tanjung Mulia	Desa Ujung Tanjung	Desa Tanjung Mulia	Desa Ujung Tanjung
2010	32,57	66,65	67,42	33,34
2011	44,85	54,08	55,14	45,91
2012	43,71	54,48	56,29	45,51
2013	60,16	57,30	58,02	42,70
2014	60,30	67,40	39,70	32,60
2015	77,16	39,54	41,54	15,31
Rata-rata	53,12	56,57	53,08	35,90

Sumber : APBDes Tanjung Mulia dan APBDes Ujung Tanjung (data diolah)

Rasio derajat desentralisasi pendapatan atau sering disebut rasio otonomi fiskal daerah adalah kemampuan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Rasio kemampuan daerah dihitung dengan cara membandingkan antara komponen pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. (Halim, 2001).

Rasio derajat desentralisasi Desa Tanjung Mulia selama periode 2010-2015 mengalami kenaikan dan penurunan meski bervariasi. Pada tahun 2010 derajat desentralisasi desa sebesar 67,42% sedang pada tahun 2011 derajat desentralisasi desa sebesar 55,14% dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan 56,29%. Pada tahun berikutnya rasio derajat desentralisasi Desa Tanjung Mulia mengalami kenaikan kembali sebesar 58,02%. Pada tahun 2014 dan 2015 rasio derajat desentralisasi mengalami penurunan dan kenaikan, pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu menjadi 39,70% sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 41,54% dibandingkan tahun 2014. Berdasarkan hasil perhitungan terlihat rata-rata derajat desentralisasi di Desa Tanjung Mulia yaitu sebesar 53,08%. Dapat dikatakan bahwa Desa Tanjung Mulia selama periode penelitian Desa Tanjung Mulia cukup terdesentralisasi, karena berada di kisaran 41-60%.

Rasio derajat desentralisasi anggaran pendapatan Desa Ujung Tanjung selama periode 2010-2015 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2010 derajat desentralisasi desa sebesar 33,34%, sedang pada tahun 2011 derajat desentralisasi desa sebesar 45,91% dan pada tahun 2012 derajat desentralisasinya sebesar 45,51%. Pada tahun 2013 mengalami penurunan derajat desentralisasi di Desa Ujung Tanjung menjadi 42,70%, pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan 32,60% pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan kembali derajat desentralisasi menjadi 15,31%. Berdasarkan hasil perhitungan terlihat rata-rata derajat desentralisasi di Desa Ujung Tanjung yaitu sebesar 35,90%.

Bila dibandingkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah antara Desa Tanjung Mulia dan Desa Ujung Tanjung yang paling mandiri dalam membiayai pembangunan daerahnya adalah Desa Tanjung Mulia. Hal ini terjadi karena Desa Tanjung Mulia merupakan Desa yang dekat dengan pusat pemerintahan dan banyaknya kegiatan ekonomi sehingga pendapatan dari sektor pajak semakin besar. Sedangkan Desa Ujung Tanjung merupakan desa yang memiliki potensi pajak rendah karena penerimaan pajak hanya diperoleh dari pajak bumi dan bangunan, dan kemampuan

dalam menghimpun dana dari potensi daerahnya masih sangat kecil dibandingkan Desa Tanjung Mulia. Seharusnya Desa Ladang panjang mampu meningkatkan PADes nya dengan menggali potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, juga meningkatkan aktivitas perekonomian sehingga Desa Ujung Tanjung dapat meningkatkan PADes nya dari sektor pajak. Hal ini merupakan upaya agar Kemampuan Pembiayaan Desa Ujung Tanjung dapat mengimbangi Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Desa Tanjung Mulia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rata-rata rasio ketergantungan di Desa Tanjung Mulia masih tergolong cukup tinggi yaitu 53,12 %. Begitu juga di Desa Ujung Tanjung yang mencapai 56,57 %. Hal ini menggambarkan bahwa Desa Tanjung Mulia dan Desa Ujung Tanjung tergolong tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada sumber pendapatan dari pihak eksternal. Secara umum dikatakan bahwa kedua desa disimpulkan Desa Tanjung Mulia dan Desa Ujung Tanjung di Kecamatan Bahar Selatan dikatakan kurang otonom.

Berdasarkan rasio derajat desentralisasi anggaran pendapatan desa yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya 53,08 % untuk Desa Tanjung Mulia cukup terdesentralisasi berarti Pendapatan Asli Desa (PADes) cukup mampu membiayai pembangunan Desa dan masih cukup rendah dalam melaksanakan otonominya. Hal yang berbeda dengan Desa Ujung Tanjung, dimana rasio derajat desentralisasi anggaran pendapatan desa menunjukkan angka rasio rata-ratanya yaitu 35,90 % kurang terdesentralisasi. Secara umum dikatakan bahwa Desa Tanjung Mulia cukup otonom sedangkan Desa Ujung Tanjung kurang otonom di Kecamatan Bahar Selatan.

Saran

Untuk mengurangi derajat ketergantungan anggaran penerimaan desa, maka kedua desa harus melakukan pengawasan atas sumber pendapatan asli desa yang telah dikucurkan untuk pembangunan desa. Untuk mencapai derajat desentralisasi anggaran pendapatan desa maka kedua desa penelitian harus mampu menggali ataupun mengoptimalkan obyek-obyek pungutan pendapatan asli desa yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk meningkatkan perbedaan rasio kemampuan anggaran pendapatan desa ke kategori derajat desentralisasi sangat tinggi dan ketergantungan keuangan rendah sekali, maka kedua desa harus meningkatkan penerimaan dari pendapatan asli desa sendiri, memobilisasi dan mengawasi penerimaan pendapatan asli desa sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Damarsari, R., Junaidi, J., & Yulmardi, Y. (2015). Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(3), 161-172.
- Halim, Abdul. (2010). *Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik/Pemda*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Halim, dan Damayanti. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Seri bunga rampai manajemen keuangan daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Lestari. (2011). *Grand Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Universitas Lampung*. (<http://jurnal.online.com>) diakses pada 22 Oktober 2016.

- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pemekaran Kecamatan Bahar Selatan Singarimbun, (1984). *Metode Penelitian yang Baik dan Benar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Widjaja, H.A.W, (2003). *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Widjaja, H.A.W, (2005). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Raja Grafindo Persada: Jakarta